BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, lembaga keuangan, terutama lembaga perbankan, memainkan peran strategis yang semakin penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Peran strategis penting lembaga perbankan adalah untuk membuktikan bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian, lembaga perbankan harus mampu mencapai tujuan perbankan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (tentang Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Negara dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional Meningkatkan kesejahteraan semua orang sebagai kerangka kerja. Tentunya tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan dukungan sistem perbankan yang sehat dan stabil.¹

Kegiatan utama dari bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 2) untuk meningkatkan pendanaan Standar hidup masyarakat. Kegiatan pokok bank sebagai penyalur dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kredit, sedangkan kegiatan pokok

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, kencana, Jakarta, 2014, Hal.x

bank sebagai penyimpan dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan lain-lain. Masyarakat seringkali bingung memilih bentuk tabungan yang disediakan bank, terutama antara tabungan dan deposito. Untuk deposito, nasabah hanya dapat menarik dana sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Berbeda dengan simpanan tabungan yang bisa ditarik kapan saja. Perbedaan lain antara deposito dengan tabungan adalah simpanan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan likuiditas berlebih (nasabah) dan dapat digunakan sebagai sarana menabung sekaligus investasi pada saat bersamaan, karena biasanya produk tersebut memberikan keuntungan finansial.²

Meskipun bank memiliki produk simpanan yang beragam, namun alasan terpenting nasabah menyimpan uang di bank adalah berharap dananya dapat disimpan dengan aman di bank. Namun, tidak jarang nasabah mengalami kerugian. Kerugian tersebut antara lain disebabkan oleh tindak pidana bank atau kelalaian bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam sistem perbankan nasional, karena dalam hal ini nasabah juga merupakan konsumen yang wajib dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.³

Pentingnya perlindungan konsumen juga ditunjukkan dengan memasukkan perlindungan konsumen ke dalam pilar keenam sistem perbankan Indonesia. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan perlindungan nasabah, salah satunya

² Anindya Febriana, Bambang Eko, dan Siti Malikhatun, *Perlindungan Hukum Terhadap Depositor Dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, Hal.2

³ *Ibid*, Hal. 2

dengan mengeluarkan ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pengaduan nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia 7/7 / PBI / 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia 7/7 / PBI / 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia 10/10 / PBI / 2008. Tugas mewujudkan perlindungan konsumen selanjutnya adalah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011. Tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain upaya-upaya tersebut , bank juga harus melakukan upaya lain dalam operasional usahanya, yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan harapan dapat mengurangi risiko bisnis perbankan yang tinggi dan memungkinkan kelancaran perkembangan bisnis perbankan.⁴

Pada saat ini masih terdapat kelemahan mengenai perkembangan bisnis perbankan (terutama dalam hal keamanan), sehingga memberikan kesempatan kepada sekelompok orang tanpa niat jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, kejahatan atau tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, membocorkan rahasia bank, dan tindakan lain yang melibatkan pejabat atau pengelola bank yang tidak etis untuk memberikan informasi tentang kerahasiaan bank kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.⁵

⁴ *Ibid*, Hal.3

⁵ Cindy Mariana Tarore, *Perlindungan Hukum Terhadap Deposan Dalam Perjanjian Transaksi Deposito Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Lex Privatum, Vol. IV No. 1, Januari /2016, Hal. 157

Berbagai upaya yang dilakukan belum cukup untuk melindungi nasabah. Selama ini masih banyak kasus kelalaian bank yang merugikan nasabah terhadap prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah Bank BCA di Surabaya, diduga uang yang disimpan dalam deposito bank tersebut hangus dan depositonya tersebut tidak bisa dicairkan karena sudah dianggap kadaluwarsa karena sudah berpuluh-puluh tahun sejak tahun 1998.

Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas, maka penulis ingin mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum depositan dalam pelaksanaan simpanan deposito. Oleh karena itu, judul penulisan hukum yang dipilih dalam penulisan hukum ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PT. BANK BCA TERHADAP PERISTIWA HILANGNYA SALDO DEPOSITO**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum nasabah pengguna produk Deposito di Indonesia ?
2. Bagaimana kronologi hilangnya Saldo Deposito Nasabah di PT. Bank BCA ?
3. Bagaimana tanggung jawab Bank BCA terhadap peristiwa hilangnya saldo deposito Nasabah ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan uraian perumusan masalah, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini antara lain :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan hukum nasabah pengguna produk deposito di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis kronologi hilangnya saldo deposito Nasabah di Bank BCA
3. Memahami dan mengkaji bentuk tanggungjawab Bank BCA terhadap hilangnya deposito nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan Bank terhadap perlindungan Nasabah dalam mengatasi hilangnya saldo deposito sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No.6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Jo UU No.3 tahun 2004 .
 - b) Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat dalam penyelesaian studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengguna deposito untuk mengetahui kebijakan bank tentang perlindungan Nasabah yang diatur melalui Undang-Undang Perbankan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan nasabah bank dan penggunaan deposito, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian lanjutan.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH PT BANK BCA TERHADAP PERISTIWA HILANGNYA SALDO DEPOSITO”** maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶

⁶ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020, Pukul 20.05 WIB.

2. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank untuk menempatkan dananya dalam bentuk simpanan di perbankan konvensional (Bank BCA).

3. Perlindungan Nasabah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan, segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dengan menggunakan jasa perbankan konvensional (Bank BCA) dalam memberikan perlindungan konsumen.

4. Perbankan Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara rutin menurut jenisnya termasuk bank konvensional dan bank perkreditan rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank BCA.

5. Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi ”Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menganut metode yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau metode doktrinal yaitu teori hukum dan pendapat ilmuan, terutama undang-undang terkait dengan masalah yang dibahas.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menguraikan masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori terkait, kemudian mengumpulkan data berdasarkan sejumlah besar data yang dikumpulkan, diolah dan disusun berdasarkan data yang ada untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan teori regulasi yang berlaku. Begitu pula dengan implementasi hukum pada objek penelitian di masyarakat.⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini bersumberkan pada sumber bahan penelitian primer dan sumber bahan penelitian sekunder, yaitu:

⁷ Undang-Undang No.10 tahun 1998

⁸ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal. 24

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 105-106

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang No.6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Jo UU No.3 tahun 2004 .
- 2) Undang – Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Deposito
- 3) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) POJK Nomor: 1 POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer menjelaskan bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang

¹⁰ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 141

lebih mendalam.¹¹ Oleh karena itu, adanya penguatan berbasis hukum mengarah pada analisis hukum yang baik. Maka, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai perbankan dan deposito
- 3) Hasil penelitian yang terdahulu
- 4) Pendapat ahli yang kompeten

c. Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum yang ketiga yaitu bahan hukum pelengkap atau tersier, pada dasarnya memberikan penjelasan dan petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier, seperti: KBBI, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan, salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*Library research*).¹³ Penelitian kepustakaan berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁴

¹¹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 23

¹² *Ibid*, Hal. 54

¹³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 08 No.01, Mei 2014, Hal. 68

¹⁴ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal. 63

b. Studi dokumen

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah teknologi pengumpulan data, melalui studi pustaka untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Danial, penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan banyak dokumen berdasarkan pertanyaan penelitian sebagai data informasi, seperti peta, statistik, jumlah pegawai dan nama, data siswa, dan data populasi. Grafik, gambar, surat/akte, foto, sertifikat, dan lain-lain.¹⁵

c. Analisis Data Penelitian

Bogdan¹⁶ dalam Sugiyono mengartikan analisis data adalah proses mencari dan meringkas secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Metode yang digunakan adalah mengolah data menurut kategori, mendeskripsikan unit, mensintesis, dan menyusun, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari. Dan menarik kesimpulan agar Anda dan orang lain bisa mengerti dengan mudah. Sedangkan Muhammad¹⁷ mendefinisikan analisis data sebagai mengidentifikasi dan menyusun pola, kategori, topik, topik atau pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian.

¹⁵ Nur fatin, *Pengertian Studi Dokumentasi Serta Kelebihan Dan Kekurangannya*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html>, di akses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.30 WIB.

¹⁶ Bogdan dalam buku Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hal.244

¹⁷ Muhammad dalam buku Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hal.245

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pembahasan skripsi ini agar menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari 4 BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang Perbankan, Kegiatan Bank dalam Penghimpunan dana dan Penyaluran dana, pengawasan bank, perbankan dalam prespektif islam, perlindungan nasabah bank, serta Tanggung Jawab Bank.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisi bagaimana perlindungan bank terhadap dana nasabah, pembahasan mengenai perlindungan hukum, kronologi kasus dan upaya hukum yang dilakukan bank terhadap nasabah.

BAB IV : PENUTUP

memuat kesimpulan dan saran dari penulis.